BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Karena penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang ada.[1]

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji bagaimana identifikasi dan efektivitas hukum tersebut dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam berbagai presepsi stakeholder yang berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung terkait dengan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan pada setiap bangunan gedung, berbagai hambatan yang dihadapi serta solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terkait dengan fakta yang dihadapi untukmengatasi hambatan-hambatan yang ada sehingga dapat dilihat seberapa efektif produk hukum daerah tersebut.

[1] Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.10.

Pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji dari segi hukum melalui peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaran bangunan terkait kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan pada setiap bangunan gedung. Sedangkan pendekatan sosiologis depergunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan yang ada.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang

Lokasi penelitian pertama yang dipilih oleh penulis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang yang terletak di Jalan Bingkil Nomor 1 Malang, karena instansi tersebut sebagai pengawas atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan juga sebagai implementator sekaligus penegak hukum dari produk hukum daerah tersebut.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

Lokasi kedua yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang yang terletak Jalan Mayjen Sungkono (Perkatoran Terpadu, Gedung A Lantai 2) Malang,

karena instansi tersebut sebagai pihak yang berwenang atas keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB).

1. **Bangunan Gedung atau Rumah Wilayah Kelurahan Mojolangu Kota Malang**

   Selain itu juga sebagai data pendukung, lokasi ketiga yaitu bangunan gedung yang dibatasi dalam kegiatan manusia untuk hunian atau tempat tinggal yang berada di wilayah Kelurahan Mojolangu Kota Malang. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut rawan terjadinya peluapan air atau banjir pada musim hujan.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan pada penelitian yang telah dilakukan. Data primer ini terfokus pada presepsi berbagai stakeholder mengenai efektivitas pelaksanaan pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, berbagai bentuk hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung serta solusi yang harus dilakukan terkait dengan fakta yang dihadapi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder terfokus pada pada studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam hal ini, sumber data primer berasal dari sampel responden penelitian sebagaimana akan diuraikan pada sampel responden.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang dalam bentuk dokumen yang dipergunakan terkait dengan bangunan gedung dan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan pada setiap bangunan gedung.

E. Teknik Memperoleh Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik memperoleh data, yaitu:

1. Teknik Memperopleh Data Primer

Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara di lapang guna mempermudah dalam hal mewawancarai stakeholder yang menjadi informan penelitian. Apabila stakeholder tidak bersedia diwawancarai karena alasan kesibukan atau khawatir privasinya terusik, pewawancara meninggalkan kuesioner terbuka untuk diisi oleh informan.

2. Teknik Memperopleh Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumentasi yang terkait dengan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan pada setiap bangunan gedung. Selain itu juga melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan yang ada di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, data di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta penelusuran internet.

F. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 143 orang yang didalamnya terdapat:

a. Bidang Sumber Daya Air
    1) Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (SDA)
    2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan SDA
    3) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase
b. Bidang Cipta Karya
    1) Seksi Bangunan Gedung
    2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
    3) Seksi Bina Jasa Konstruksi
c. Bidang Tata Ruang
    1) Seksi Perencanaan Tata Ruang
    2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
    3) Seksi Pengendalian Tata Ruang

Bidang-bidang serta seksi-seksi tersebut yang menangani urusan SDA, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, bina jasa konstruksi, perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berjumlah 12

orang berserta 24 orang (staff) sehingga total berjumlah 36 orang didalamnya sebagai populasi penelitian ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 98 orang yang didalamnya terdapat:

a. Bidang Data dan Sistem Informasi,
    1) Seksi Pendataan
    2) Seksi Pengembangan
    3) Seksi Pengaduan
c. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang-bidang serta seksi-seksi tersebut yang menangani urusan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) termasuk dalam hal pendataan, pengembangan, dan pengaduan yang berjumlah 5 orang beserta 23 orang (staff) sehingga total berjumlah 28 orang didalamnya sebagai populasi penelitian ini.

Bangunan gedung wilayah Kelurahan Mojolangu yang dibatasi untuk fungsi hunian atau pemukiman dengan responden stakeholder yang berkaitan dengan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan yaitu seluruh Ketua RT dan RW sebagai pengawas pelekat dilingkungan wilayah Kelurahan Mojolangu Kota Malang yang berjumlah 136 orang (Ketua RT dan RW).

2. Sampel

Sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, adalah dengan teknik pengambilan sampai dengan cara pemilihan sekelompok

subjek atas ciri-ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi diatas. Sampel responden yang berjumlah 10% dari populasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah sumber yang diketahui dan dipahami terkait dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, juga terkait dengan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan pada setiap bangunan gedung, yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang

   Perwakilan pegawai yang dapat menjadi informan berjumlah 3 orang dari 36 orang yang ada pada DPUPR Kota Malang terkait penelitian ini yaitu:

   1) Ir. Bambang Nugroho, MT, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
   2) Ir. Agus Pratoyo, MT, Kepala Bidang Cipta Karya;
   3) Ir. Waskito Widyarmono, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Bidang Tata Ruang.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang

   Informan dari pihak DPMPTSP Kota Malang yang terkait dalam penelitian ini berjumlah 2 orang dari 28 orang yang ada yaitu:

1) Dra. Alawiyah, MM, Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi;
2) Ir. Iwan Rizali, MM, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;

c. Untuk pengambilan sampel bangunan gedung atau rumah wilayah Kelurahan Mojolangu, berdasarkan total jumlah Ketua RT dan RW Kelurahan Mojolangu yaitu 136 orang Ketua RT dan RW Kelurahan Mojolangu. Sehingga peneliti mengambil sampel sebesar 10% dari total jumlah RT dan RW Kelurahan Mojolangu yang dipilih secara acak menjadi 14 orang Ketua RT dan RW Kelurahan Mojolangu sebagai responden untuk pengambilan sampel bangunan gedung atau rumah pada wilayah Kelurahan Mojolangu.

3. Teknik Sampling

Adapun cara pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sample*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, disini peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam hal ini, data diperoleh melalui beberapa responden terkait langsung dengan penyelenggaraan bangunan dan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan

memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
3. Kewajiban pembuatan sumur resapan sebagai sistem penyaluran air hujan yaitu keharusan adanya sumur resapan yang dilaksanakan dengan perbuatan membuat sumur resapan sebagai sarana pengaliran air hujan dengan meresapkannya terlebih dahulu ke dalam tanah yang ada disekitar bangunan gedung.
4. Bangunan gedung yaitu bangunan yang didirikan atas hasil pekerjaan konstruksi manusia yang menyatu dengan tempat berdirinya suatu bangunan baik di dalam atau di atas tanah dan/atau air sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang terbatas pada kegiatan untuk hunian atau tempat tinggal.